

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) DARING

IPK: 3.3.9/IPK 4.3.11

Sekolah : UPT SMP NEGERI 5 KOTA MOJOKERTO	Kelas/Semester : VIII (Genap)
Mata Pelajaran : IPS	Alokasi Waktu : (2 x Pertemuan)
Sub Materi Pokok: PENDISTRIBUSIAN KEMBALI (REDISTRIBUSI) PENDAPATAN NASIONAL	

TUJUAN PEMBELAJARAN

Melalui Model *Problem Based Learning* peserta didik diharapkan mampu **menganalisis** pendistribusian kembali pendapatan nasional dengan teliti dan mampu **menyajikan** laporan hasil diskusi tentang redistribusi pendapatan nasional dengan baik.

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan/ Sintaks	Deskripsi Kegiatan	PPK	Waktu*
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none">Mengecek kehadiran peserta didik melalui aplikasi <i>Google Classroom</i> dan merekapnya menggunakan <i>Google Form</i>.Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai melalui beranda <i>Google Classroom</i>.Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok dengan anggota 5-6 orang.	Religius Nasionalis	
Kegiatan Inti Tahap – 1 Orientasi Masalah LITERASI 4Cs HOTS	<i>Creativity Thinking and innovation</i> <ol style="list-style-type: none">Menjelaskan masalah yang diangkat kepada peserta didik.Mengirim file LK berbasis masalah yang kepada peserta didik melalui <i>Google Classroom</i>.	Kemandirian	
Tahap – 2 Mengorganisasikan Peserta Didik	<i>Creativity Thinking and innovation</i> <ol style="list-style-type: none">Peserta didik berbagi peran atau tugas untuk menganalisis permasalahan yang telah didapat dengan menggunakan rumus 5W+1H (diskusi dilakukan di beranda <i>Google Classroom</i>).	Kemandirian Integritas	
Tahap – 3 Membimbing Penyelidikan	<i>Collaboration</i> <ol style="list-style-type: none">Peserta didik mengumpulkan informasi yang sesuai baik melalui media cetak maupun memanfaatkan internet untuk mendapatkan berbagai teori atau materi yang mendukung pemikiran mereka.Peserta didik dalam melaksanakan kegiatan analisis berpedoman pada LK Berbasis Masalah serta bimbingan guru agar tetap fokus dan pembahasan tidak melebar. Kegiatan dilakukan menggunakan aplikasi <i>Google Classroom</i>.	Gotong royong	
Tahap – 4 Mengembangkan dan Menyajikan Hasil	<i>Critical Thinking and Problem Solving;</i> <ol style="list-style-type: none">Peserta didik mengembangkan hasil analisis dengan meninjau permasalahan yang telah dianalisis melalui berbagai segi disiplin ilmu sosial (Ekonomi, Sejarah, Geografi, Sosiologi).	Gotong royong	
Tahap – 5 Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah	<i>Critical Thinking and Communication</i> <ol style="list-style-type: none">Peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya melalui pembuatan video presentasi yang dikirim ke Group Pembelajaran Daring IPS <i>Whatsapp</i>.	Gotong royong Integritas	
Penutup	<ol style="list-style-type: none">Mengecek hasil diskusi peserta didik yang dikirim dalam bentuk <i>File Ms. Word</i>.Menilai presentasi peserta didik yang dikirimkan dalam bentuk video.	Integritas	

*Waktu menyesuaikan karena pembelajaran dilaksanakan secara daring

PENILAIAN

Penilaian Sikap: Observasi/Jurnal; **Penilaian Pengetahuan:** Tes Tulis, Penugasan;

Penilaian Keterampilan: (1) Unjuk Kerja Kegiatan diskusi dan presentasi;

Mengetahui,
Kepala SMP N 5 Kota Mojokerto,

Mojokerto, Juli 2020
Guru Mata Pelajaran,

NONO PURNOMO, S.Pd, M.Pd
NIP. 19761127 200801 1 003

CHANIA DWI C.A, S.Pd
NIP. 19941002 201903 2 011

LAMPIRAN

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis Masalah

PETUNJUK!

1. Kerjakan secara berkelompok (6-7 orang);
2. Pilihlah satu permasalahan dan beritahukan pada guru permasalahan yang telah dipilih (tidak boleh sama);
3. Gunakan rumus 5W+1H untuk menganalisis *problem* yang tersedia;
4. Kaitkan dengan disiplin ilmu sosial yang kalian ketahui (Sejarah, Ekonomi, Sosiologi, atau Geografi);
5. Pendapat yang disertakan harus disertai sumber-sumber yang mendukung baik dari buku, koran, artikel baik cetak maupun non cetak (boleh menggunakan HP untuk mengakses informasi);
6. Presentasikan hasil analisis dalam bentuk video dan dikumpulkan melalui Whatsapp Group.

PENGEMBANGAN UMKM: Pemasaran dan Promosi Masih Jadi Kendala

Bisnis.com, DENPASAR - Persoalan pemasaran dan promosi merek masih menjadi salah satu kendala terbesar bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam meningkatkan skala bisnisnya di Indonesia. Direktur Utama PT Bahana Artha Ventura (BAV) M. Sidik Heruwibowo mengatakan selain konsistensi dalam menjaga kualitas produknya, para pelaku UMKM acap kali mengalami kendala dalam menjual produknya. Hal itu tak lepas dari kecenderungan para pelaku usaha tersebut yang lebih memfokuskan diri dalam proses produksi tanpa diimbangi oleh pemasaran dan promosi.

Hal itu juga tak lepas dari sikap sejumlah lembaga pembiayaan yang hanya sekadar menyalurkan pembiayaan kepada UMKM, tanpa melakukan pendampingan secara kontinu. Alhasil, para pelaku UMKM sering gagal memanfaatkan pembiayaan yang diberikan secara maksimal atau efektif untuk mengembangkan bisnisnya. Untuk itu dia menilai pendampingan serta pelatihan pemasaran dan promosi menjadi bagian yang tak boleh dilepaskan dalam membangun ekosistem UMKM di Indonesia. Dia mengatakan langkah tersebut harus dilakukan agar UMKM dapat benar-benar naik kelas dan mampu menjalankan industrinya secara jangka panjang.

Sementara itu, Direktur Utama Kaya.id Juanita Kartikasari mengatakan para pelaku UMKM banyak yang belum memahami bahwa anggaran promosi dan pemasaran harus dimasukkan dalam biaya operasional bisnisnya. Menurutnya, para pelaku UMKM hanya menghitung biaya operasionalnya dari ongkos produksi semata. Dihubungi secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mengakui aspek promosi dan pemasaran belum banyak dijadikan fokus bisnis oleh para pelaku UMKM. Hal itu menjadi salah satu penyebab keberlangsungan bisnis UMKM cenderung berjangka menengah atau pendek. Untuk itu dia mengharapkan pihak-pihak yang melakukan pendampingan usaha, terutama perusahaan besar, turut mengajarkan aspek promosi dan pemasaran secara mendalam kepada pelaku UMKM. Dia menilai, selain mengembangkan program inkubasi di sisi produksi dan pemasaran, para pendamping juga diharapkan mengajarkan proses pencatatan laporan keuangan. Pasalnya, menurutnya banyak pelaku usaha UMKM yang masih belum menguasai kemampuan pencatatan laporan keuangan. Alhasil, bisnisnya menjadi tidak sehat.

Sumber: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191213/12/1181057/pengembangan-umkm-pemasaran-dan-promosi-masih-jadi-kendala>

UMKM Naik Kelas, Teten Masduki Jadikan Sasirangan Bordir Contoh

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) terus mendorong sektor UMKM untuk naik kelas, dari mikro ke kecil, kecil ke menengah. Untuk itu diperlukan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta dalam mewujudkan program nasional tersebut. Salah satunya adalah Sasirangan Bordir NDF yang berada di Desa Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, Sasirangan bordir merupakan industri rumahan, potret usaha mikro yang terus berkembang dengan dukungan pemerintah daerah, dengan membudayakan sebagai pakaian dinas.

"Ini sudah jadi industri rumahan yang berkembang. Tadinya masyarakat disini pendulang intan. Sekarang pelan pelan terlibat dalam batik Sasirangan. Permintaannya cukup besar bahkan kurang," kata Menkop dan UKM Teten Masduki di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (7/2). Menurutnya dengan pembiayaan dari BNI melalui Kredit Usaha Rakyat membuat usaha mikro ini naik kelas menjadi usaha kecil. Pihaknya optimis sektor tersebut akan terus berkembang, dikarenakan market yang selalu dibutuhkan.

Meskipun belum berorientasi ekspor, namun dengan upaya yang dilakukan pemerintah daerah mewajibkan pegawainya menggunakan batik Sasirangan merupakan langkah yang tepat. Menkop dan UKM mengharapkan adanya pengembangan produk melalui riset dan *development* kerja sama dinas UMKM dan BNI. Agar produk yang dihasilkan disesuaikan selera pasar serta design baru. "Harus dikembangkan riset and *development*-nya. Mengembangkan produk design baru disesuaikan dengan selera. Karena UMKM rata rata tidak punya riset. Kerja sama dengan dinas, BNI. Terus mengembangkan bukan hanya design juga *development* produk," ujarnya.

Selain itu, kata Teten, harus mulai dirubah, pewarna yang selama ini menggunakan bahan kimia, ke bahan alam. Karena di wilayah Kalimantan diakui memiliki kekayaan yang luar biasa dalam hal pewarna alami. "Dusahakan bahan motif pewarna. Ini masih pakai kimia. Kedepan dipikirkan alam. Di kalimantan banyak pewarna alam. Suku dayak punya pengetahuan banyak tentang itu," jelasnya.

Sumber: <https://www.wartaekonomi.co.id/read270824/umkm-naik-kelas-teten-masduki-jadikan-sasirangan-bordir-contoh>

Subsidi Belum Dicabut, Kok Harga Gas 3 Kg Sudah Naik

WE Online, Jakarta - Harga gas elpiji tiga kilogram di sejumlah kawasan Medan dan Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut), mulai naik. Rata-rata harga gas elpiji dibanderol sekitar Rp 25.000-Rp 35.000 per tabung. "Kaget, beli gas 3 kg udah Rp 35.000 per tabung dari Rp 20.000. Kata penjualnya, gas sudah sulit karena pemerintah mau cabut subsidi gas," ujar warga di Jalan Sempurna, Medan, T Risna S di Medan, Minggu (19/1).

Menurut Risna, meski kecewa karena harga jual mahal, dia terpaksa membeli karena memang membutuhkannya. Dia mengatakan, dengan kenaikan harga gas, pengeluaran rumah tangga akan semakin besar karena harga bahan pokok juga naik. Warga Tanjungmorawa, Deliserdang, Evi, juga mengaku terkejut dengan kenaikan harga gas. Padahal, menurutnya pencabutan subsidi gas belum diterapkan. "Harga gas menjadi Rp 25.000 per tabung .Padahal pemerintah infonya baru akan mencabut subsidi bulan Agustus," katanya.

Unit Manager Communication and CSR PT Pertamina MOR I, M Robby Hervindo, menegaskan, harga elpiji bersubsidi belum naik. Bahkan, katanya, belum ada kebijakan baru soal gas elpiji 3 kg itu. "Tidak ada kenaikan harga elpiji 3 kg, tetap sesuai HET di tingkat pangkalan," katanya, Minggu. Dia menegaskan, pasokan gas juga cukup aman

walau hingga saat ini belum ada penetapan kuota elpiji dari BPH Migas. Namun dia mengakui pada Januari tahun 2020, alokasi gas elpiji 3 kg itu sekitar 10 juta tabung.

Sumber: <https://www.wartaekonomi.co.id/read267299/subsidi-belum-dicabut-kok-harga-gas-3-kg-sudah-naik>

Program Pengentasan Kemiskinan KPM/PKH di Mojokerto Masih Terkendala. Ini Penyebabnya

SURYA.co.id | MOJOKERTO - Pengentasan kemiskinan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia di Kabupaten Mojokerto masih menuai kendala. Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mencatat, dua kendala yang dihadapinya sekarang ini yakni persoalan sinkronisasi data KPM/PKH dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil). "Kendala kedua yaitu dari Sumber Daya Manusia (SDM) KPM/ PKH terkait penggunaan keuangan non tunai," ujar Iwan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto kepada Surya, Selasa (21/1/2020). Ia mengatakan, adapun kendala sinkronisasi dengan Dispendukcapil yaitu ada KPM yang datanya dulu belum memakai E-KTP. Dinas Sosial akan terus berkoordinasi dengan dinas Dispendukcapil untuk mempercepat sinkronisasi tersebut. "Karena program PKH di Kabupaten Mojokerto mulai tahun 2007 yang sebagian data KPM belum memakai E-KTP," ungkapnya.

Untuk persoalan SDM KPM/ PKH sebagian mereka terkadang lupa password kartu Anjungan Tunai mandiri (ATM) yang digunakan untuk menerima dana bantuan dari pemerintah pusat. "Jadi ada beberapa KPM pada waktu pengambilan di ATM lupa PIN-nya dan kalau memasukkan PIN yang salah sampai tiga kali secara otomatis ATM akan terblokir," jelasnya. Ditambahkannya, nominal yang diterima setiap KPM satu dengan lainnya bisa tidak sama. Pasalnya, ada beberapa komponen yang mempengaruhi nominal yang tidak sama dengan kota lainnya. Dia mencontohkan apabila satu KPM dengan komponen satu orang lanjut usia, 1 balita, 2 anak sekolah SMA, maka KPM tersebut bisa menerima Rp.8.800.000 per tahun, yang dibagikan secara bertahap sebanyak 4 kali. Jadi setiap pembagian nominalnya mencapai Rp.2.200.000. "Dana KPM-PKH di Kabupaten Mojokerto senilai Rp.18.300.875.000, dari Kemensos langsung ke rekening KPM," tandasnya.

Sumber: <https://surabaya.tribunnews.com/2020/01/21/program-pengentasan-kemiskinan-kpmpkh-di-mojokerto-masih-terkendala-ini-penyebabnya>.

Ratusan Penerima Program Keluarga Harapan Mundur, Ini Kata Dinsos Blitar

Blitar - Ratusan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Blitar mundur karena merasa tidak pantas. Dinas Sosial Kabupaten Blitar mengapresiasi keputusan mereka. "Kami mengapresiasi yang mundur dari pemanfaat PKH. Kami pun mendidik warga tidak terus-menerus menerima bantuan. Ada pelatihan kewirausahaan agar warga bisa lebih mandiri ekonomi. Kami akan lepas penerima manfaat jika dia benar-benar sudah bisa mandiri ekonomi," kata Kepala Dinas Sosial Pemkab Blitar Romelan, Selasa (21/1/2020).

Terkait bantuan yang salah sasaran, ia menegaskan, dibutuhkan kepedulian semua pihak untuk saling mengontrol dan membenahi data warga yang lebih membutuhkan. "Yang penting semua saling peduli. Pemerintah *welcome* semuanya, sehingga sudah tidak ada warga miskin yang kelewatan lagi, karena kewenangan sudah diserahkan ke desa," imbuhnya.

Data penerima manfaat PKH, lanjutnya, diberikan berdasarkan Basis Data Kesejahteraan Sosial (BDKS). Operator desa telah mendapatkan pelatihan teknis untuk entri data tersebut di aplikasi SIKS-NG. "Saya *ndak nyalahkan* desa. *Yo*

dielingno (ya diingatkan), bawakan lengkap dokumen pendukung tetangga Anda yang miskin itu supaya dimasukkan usulan penerima manfaat PKH. Kami tidak membatasi jumlah. Namun ada SK Kemensos, yang tahun 2020 ini turun tiga kali dalam setahun. Mungkin saja SK-nya belum turun," terangnya.

Romelan menjelaskan yang berwenang menentukan skala prioritas penerima bantuan juga desa. Data BDKS itu kemudian dikirimkan ke Kemensos untuk menerbitkan SK pencairan bantuan. Ia mengingatkan PKH merupakan bantuan bersyarat. Tidak semua warga miskin berhak menerimanya. Ada beberapa syarat sebuah keluarga masuk dalam usulan penerima manfaat, yakni keluarga miskin yang punya ibu hamil, punya lansia di atas 60 tahun, atau punya anak masih usia belajar, mulai SD sampai SMA. Juga keluarga miskin yang punya penderita difabel. Sebelumnya diberitakan, 393 keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Blitar menyatakan mundur. Mereka merasa tak pantas menerima bantuan sosial itu.

Sumber: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4867228/ratusan-penerima-program-keluarga-harapan-mundur-ini-kata-dinsos-blitar>